

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur (Studi Di UPT Pendidikan Muara Bengkal)

Aweq Ampung¹, Adam Idris², Achmad Djumlani³

Abstract

This study has two objectives: first, to know the financial management system in East Kutai District Education Office in particular UPT Bengkal Muara Education and Evaluation and second, to know the policies relating to the management of the Department of Education in East Kutai in particular financial delegation to the Education Unit in Muara Bengkal. In this study the author uses primary data from informants which are structural officials and employees directly involved in the financial management system and other relevant officials.

Keywords: Financial Management, Delegation of Finance, Department of Education, Muara Bengkal.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur khususnya UPT Pendidikan Muara Bengkal dan Untuk mengetahui Evaluasi kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur khususnya pelimpahan keuangan ke UPT Pendidikan Muara Bengkal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang bersumber dari informan yaitu beberapa pejabat struktural dan pegawai yang terlibat langsung pada sistem pengelolaan keuangan dan pejabat terkait lainnya.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Pelimpahan Keuangan, Dinas Pendidikan, Muara Bengkal.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur diberikan mandat oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur sebagai pengelola pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. Pengelola pendidikan yang baik adalah pengelola yang mengetahui persis tugas pokok dan fungsi yang diembannya termasuk pembinaan dan bimbingan terhadap unit-unit pelaksana teknis, sehingga mampu membawa pendidikan ke arah pencapaian visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai. Hal itu akan terwujud apabila seluruh *stake holder* yang ada dalam organisasi pendidikan ini digerakkan secara visioner.

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, perlu diimbangi dengan penyempurnaan sistem

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.

pengelolaan keuangan. Selama ini semua kegiatan yang melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan di masing-masing kecamatan, pengelolaan keuangannya masih terpusat di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang bertempat di Ibu Kota Kabupaten, Sangatta. Hal ini menyebabkan banyaknya kendala dalam hal pemberian gaji dan tunjangan bagi guru maupun staff Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur di masing-masing Kecamatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dalam mempermudah pengelolaan keuangan melakukan kebijakan pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan kepada UPT Pendidikan di masing-masing kecamatan. Salah satu UPT Pendidikan yang diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya adalah UPT Pendidikan Kecamatan Muara Bengkal. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah bagi masing-masing UPT dalam mengelola keuangannya. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pemberian kewenangan pengelolaan keuangan ke UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, pemberian kewenangan juga untuk melihat respon dari para kepala UPT mengenai kebijakan pengelolaan keuangan yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ke UPT, berikut gambaran keuangan UPT Pendidikan Muara Bengkal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Kecamatan Muara Bengkal memiliki luas wilayah 1.562,30 km², UPTD Dinas Pendidikan Kec. Muara Bengkal merupakan salah satu unit di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang telah menerima kebijakan pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah. Jenis kewenangan anggaran yang dilimpahkan disini adalah pos gaji dan operasional kantor yang tercatat pada mata anggaran besaran yang diterima oleh UPTD Kecamatan Muara Bengkal pada tahun 2014. Digambarkan pula jumlah sekolah di Kecamatan Muara Bengkal sebanyak 17 Sekolah terdiri dari 9 Sekolah Dasar, 5 Sekolah Menengah Pertama, 2 Sekolah Menengah Atas yang berstatus milik pemerintah Dinas Pendidikan Kutai Timur, dengan jumlah murid masing-masing untuk Sekolah Dasar sebanyak 1.908 Jiwa dengan jumlah tenaga pengajar sejumlah 212 Jiwa, jika diprosentasikan antara tenaga pengajar dengan siswa sekolah adalah sembilan murid berbanding satu guru, hal ini masih terlihat wajar. Selanjutnya siswa Sekolah Menengah Pertama sebanyak 664 Jiwa dengan jumlah tenaga pengajar sejumlah 83 jiwa, jika dihitung perbandingannya adalah 8 siswa dengan 1 guru, sekolah menengah atas di Kecamatan Muara Bengkal berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Pendidikan tercatat hanya 2 sekolah dengan jumlah siswa 389 jiwa dengan jumlah tenaga pengajar 31 jiwa.

Evaluasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Kebijakan Publik

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara

harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan masih menjadi perdebatan tersendiri dikalangan para ahli.

Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Arti dari keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Halim (2004: 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sistem pengelolaan keuangan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kutai Timur kepada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Muara Bengkal merupakan sebuah bentuk kebijakan pemerintah daerah berupa pelimpahan kewenangan untuk mengatur keuangan secara mandiri sesuai dengan aturan yang ada dan akan ada sistem evaluasi apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan survey. Metode eksploratif yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh dan menggumpulkan informasi serta keterangan-keterangan secara faktual yang ada di lapangan. Adapun fokus penelitian ini untuk menggali tentang kelembagaan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur khususnya pelimpahan pengelolaan keuangan ke UPT Pendidikan. Kelembagaan yang dimaksud disini yaitu kebijakan tentang pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur khususnya pelimpahan pengelolaan keuangan ke UPT Pendidikan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis lebih mendalam dari data yang telah diperoleh di objek penelitian dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1992 : 20)

Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan landasan teori, metode penelitian dan hasil analisis maka hasil penelitian yang ada adalah kebijakan publik merupakan sebuah sistem, khususnya dalam hal ini sistem politik yang terdiri dari minimal tiga elemen pokok yang memiliki hubungan kausal yang sangat erat. Ketiga elemen tersebut adalah *Input*, proses, dan *output*. Dalam hal ini kebijakan publik merupakan out put yang dihasilkan dari sistem politik tersebut (Budiman, 2009). Dikaitkan dengan hasil analisis diatas maka dapat dijelaskan implementasi kebijakan dalam hal ini adalah pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur kepada UPT Pendidikan Muara Bengkal, menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi kelancaran operasional di UPT tersebut, terjadinya efisiensi waktu, terciptanya kondisi aman bagi bendahara dalam pencairan dana operasional, realisasi anggaran yang tepat sasaran.

Dalam sistem negara kesatuan, seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama disebut sentralisasi, yang mana segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, dimana urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Dikaitkan dengan sistem pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur kepada UPT Pendidikan Muara Bengkal sangatlah sejalan dengan asas desentralisasi dimana sistem pengelolaan keuangan sudah diberikan sepenuhnya kepada daerah dan diharapkan semua sistem pengelolaan keuangan dapat terakses dengan baik. Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 3 aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu :

1. Sifat kepentingan yang dipengaruhi

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu yang diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*) (Agus Dwiyanto, 2000).

Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan komplain, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi yang akan dilaksanakan, demikian pula sebaliknya.

Bila dikaitkan dengan Implementasi kebijakan yang sedang berjalan di UPT Muara Bengkal maka diinterpretasikan bahwa sistem pelimpahan

kewenangan mempengaruhi tingkat kepentingan baik pimpinan maupun pegawai yang ada di UPT Pendidikan Muara Bengkal.

2. Kejelasan Manfaat dari Kebijakan

Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, dalam artian hanya butuh waktu yang tidak begitu lama untuk implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan serta mudah dalam proses implementasinya, sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

3. Tenaga Pelaksana dan Dukungan Sumber Daya

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan kebijakan publik tersebut.

Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang, hal ini penting untuk mengarahkan dan evaluasi perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan ketrampilan khusus.

Dengan demikian aparat pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek untuk menilai sulit tidaknya implementasi kebijakan. Komitmen, kualitas, dan persepsi yang baik nantinya akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan dan sebaliknya.

Suatu kebijakan akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

Berkaitan dengan hal diatas dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik, Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan operasional kegiatan di UPT Muara Bengkal. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan di UPT Pendidikan Muara Bengkal masih memprihatinkan.

Anggaran mengenai operasional kegiatan , khususnya pengeluaran belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju operasional di UPT. Pendidikan Muara Bengkal. Di samping itu, banyak ditemukan

keluhan pada Pegawai di UPT. Pendidikan Muara Bengkal yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan pemerataan.

Evaluasi Kebijakan Dinas Pendidikan Kutai terhadap Pengelolaan Keuangan dan Proses Pelimpahan kepada UPT Pendidikan Muara Bengkal.

Kebijakan merupakan penetapan prioritas dan dalam hubungannya dengan undang-undang merupakan landasan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kebijakan setidaknya selalu mengandung tiga komponen dasar yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan tertentu maka kebijakan tidak begitu saja lahir karena kebijakan harus bersifat menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, keadilan dan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan adalah Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Apabila dikaitkan dengan kewenangan Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat suatu kebijakan maka UPT Pendidikan Muara Bengkal diharapkan mampu menjalankan kewenangan tersebut. Pembahasan dalam membuat suatu kebijakan dapat diketahui dengan tidak bertentangnya suatu kebijakan/peraturan dengan peraturan di atasnya. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang *stufen theory*. Di dalam teori tersebut dijelaskan bahwa tertib hukum atau *legal order* itu merupakan *a system of norm* yang berbentuk seperti tangga-tangga piramid. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah (*norm*) dan di puncak piramid terdapat kaidah yang disebut kaidah dasar (*Grundnorm*). Di bawah kaidah dasar ini terdapat kaidah yang disebut Undang-Undang Dasar; di bawah Undang-Undang Dasar terdapat kaidah yang disebut Undang-Undang; di bawah Undang-Undang terdapat kaidah yang disebut Ketetapan.

Jadi menurut teori ini bahwa suatu aturan seperti piramid yang mengerucut ke atas, aturan yang paling bawah harus sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundangan. Apabila teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang *stufen theory* diaplikasikan ke dalam permasalahan kebijakan Dinas Pendidikan Kutai Timur kepada UPT. Pendidikan Muara Bengkal maka dapat diperoleh formulasi bahwa kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Berkaitan dengan data hasil penelitian maka kebijakan yang diambil berada dalam tingkat yang terendah.

Pelimpahan wewenang memungkinkan UPT. Pendidikan Muara Bengkal mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukannya. Keadaan ini memungkinkan bawahan untuk belajar bertanggung jawab. UPT sendiri akan merasakan sesuatu yang baru diantaranya: Pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik pada berbagai hal; Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat jika pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada pegawai yang bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya.

Setiap kebijakan tentunya memiliki kendala khususnya dalam pelimpahan wewenang. Bentuk kendala tersebut antara lain adalah staf yang menerima delegasi tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas tugas yang di delegasikan padanya yang akan berdampak pada kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang semestinya ia lakukan. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa pelimpahan wewenang tidak berarti juga terjadi pelimpahan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang bisa jadi hanya merupakan pelimpahan beberapa hal yang dapat dikerjakan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada UPT Pendidikan, akan tetapi tanggung jawab sepenuhnya masih berada di tangan pihak yang melimpahkan wewenang.

Tabel 1
Matrik Hasil Penelitian

NO	Uraian	Sebelum Pelimpahan Kewenangan	Sesudah Pelimpahan Kewenangan
1	Sistem Pengelolaan Keuangan	Semua kegiatan pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur	Sistem Pengelolaan dilakukan di UPTD terkait dan adanya Bendahara Pembantu
2	Perkembangan Pelimpahan Kewenangan	Mengharapkan adanya pelimpahan kewenangan sehingga dinas pendidikan lebih fokus terhadap pelayanan publik ke pada siswa/siswa dan pihak - pihak lainnya.	Kegiatan operasional menjadi lancar.
3	Faktor Pendukung	Adanya auran hukum dan ketentuan dari kepala daerah dan Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur. Jarak tempuh diharapkan adanya efisiensi waktu	UPT diharapkan mampu mengelola keuangan sendiri
4	Faktor	Keterbatasan SDM	Keterbatasan SDM,

	Penghambat		Akses jaringan IT
--	------------	--	-------------------

Sumber: Peneliti, 2015.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelimpahan keuangan dimulai sejak diterbitkan Perbub No. 9/02.188.3/HK/II/2010 pada tanggal 16 Februari 2010, selanjutnya yang menjadi syarat dari pelimpahan tersebut adalah letak Geografis yang jauh dan susah dijangkau sehingga Kepala Dinas dianggap perlu melakukan kebijakan yaitu pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan yang semula di Dinas Pendidikan Kutai Timur untuk dialihkan kepada masing-masing UPT Pendidikan di Kecamatan. Harapannya dengan adanya pelimpahan kewenangan ke UPT. Pendidikan Muara Bengkal harus mampu membedakan hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilaksanakan. Termasuk di dalamnya juga tujuan dari kebijakan tersebut.
2. Pos Anggaran yang di limpahkan adalah Pos Gaji PNS (Pegawai dan Guru Sekolah), Gaji TK2D , Insentif dan Uang makan. UPT. Pendidikan Muara Bengkal mengharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur memberikan kesempatan kepada Kepala UPT untuk menyusun Anggaran sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
3. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan agar pelimpahan wewenang bisa berjalan efektif. Penentuan tenaga yang layak mengerjakan pengelolaan keuangan, Kepala UPT Pendidikan harus mampu menentukan siapa yang memiliki kemampuan untuk menerima pelimpahan wewenang. Kadangkala ketidakpercayaan Kepala UPT Pendidikan Muara Bengkal terhadap bawahan justru akan menghambat dalam keefektifan pelimpahan wewenang. Oleh karena itu berikan tugas yang akan dilimpahkan itu sepenuhnya.
4. Intervensi pada saat diperlukan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika kadang kala apa yang didelegasikan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika hal tersebut terjadi, maka intervensi kadangkala diperlukan agar kegiatan yang telah dilimpahkan berikut kewenangannya tetap dalam jalur pencapaian tujuan UPT Pendidikan Muara Bengkal. Adanya komunikasi yang terbuka antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan UPT Pendidikan Muara Bengkal. Keterbukaan dalam berkomunikasi selain akan memberikan kejelasan akan keinginan kedua belah pihak, juga akan meminimalkan persepsi-persepsi yang keliru akan berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan.

Saran

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut di atas, berikut beberapa saran sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur :

1. Pelimpahan kewenangan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur termasuk pada UPT Pendidikan Muara Bengkal. Sehingga operasional

kegiatan sehari-hari di UPT Pendidikan menjadi lancar dan kewenangan diharapkan sepenuhnya dilimpahkan ke UPT Pendidikan.

2. Adanya pelatihan/Bimtek bagi tenaga keuangan di UPT Pendidikan, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pencairan baik di bank maupun kepada pegawai yang berhak menerima dana tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William. N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- _____, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gedeian, Arthur G. 1991. *Organization Theory and Design*. Colorado: University of Colorado at Denver.
- Husein, Muhammad Fakhri dan Amin Wibowo. 2002. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Irfan, Islamy. M. 1987. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:Bina Aksara.
- Mangkunegara, Prabu Anwar. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Miles, Matthew B. dan A Michel Huberman. 2002. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan I. Jakarta: UI – Press.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta:PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung.
- Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2006. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- _____, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Susanto, Astrid S. 1975. *Pendapat Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.